

# Peringati Hari Lahir Pancasila, Pemkab Kolot usung Semangat Memperkokoh Ideologi Bangsa

**Kolaka Utara, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Lapangan Aspirasi Pemda Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua, Minggu (1/6/2025). Upacara yang mengusung tema “*Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya*” ini berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Ketua DPRD Kolaka Utara Fitra Yudi, Wakil Ketua I DPRD Muh. Sair, Kapolres Kolaka Utara AKBP R. Todoan A. Gultom, Danyon 3 Pelopor Brimob Polda Sultra Kopol Bahtiar, Danramil Lasusua Kapten Inf Sudirman, serta sejumlah unsur forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, dan tamu undangan lainnya. Tercatat sekitar 450 orang mengikuti jalannya upacara.

Dalam amanatnya, H. Jumarding membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara yang telah mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis, tetapi jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ujar Jumarding saat menyampaikan amanat.

Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan melalui delapan agenda prioritas nasional atau *Asta Cita*, khususnya dalam pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Dalam pidato itu, Pancasila juga disebut sebagai fondasi penting dalam melawan paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga penyebaran disinformasi di tengah kemajuan teknologi.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, yang turut hadir menyaksikan jalannya upacara, mengungkapkan bahwa pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berjalan sukses dan penuh makna.

“Upacara ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat bahwa Pancasila harus terus hidup dalam setiap tindakan dan kebijakan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” ujar Syahlan.

Ia juga menambahkan bahwa semangat Pancasila harus terus digaungkan, terutama di era digital saat ini yang rawan dengan pengaruh-pengaruh negatif.

“Melalui momentum ini, mari kita bersama menjaga ruang publik dari hoaks dan ujaran kebencian, serta terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dengan susunan pasukan yang terdiri dari satu SST TNI, dua SST Polri, tiga SST gabungan Satpol PP, Damkar, dan Dishub, tiga SST ASN, serta tiga SST siswa SMP dan SMA.

---

## **Koperasi Merah Putih Watonea Terbentuk, Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Warga**

**MUNA, Sultranet.com** - Masyarakat Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, resmi membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Kelurahan Khusus yang digelar pada Jumat, 30 Mei 2025.

Musyawarah yang berlangsung penuh semangat gotong royong itu dipimpin langsung oleh Lurah Watonea, Hamsin, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat serta perwakilan warga. Dalam forum tersebut, seluruh peserta secara bulat

menyepakati pendirian koperasi sebagai langkah awal mendorong kemandirian ekonomi di tingkat kelurahan.

Struktur organisasi koperasi juga telah dibentuk dan disepakati bersama. Faisal, S.IP. dipercaya sebagai Ketua Koperasi, dengan Nita Aprilia, S.Pd. sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha dan Harsilam sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan. Posisi Sekretaris dijabat oleh Hardiman Ndikade, ST. dan Bendahara dipegang oleh Indra, Amd. Kep. Sementara itu, jajaran pengawas terdiri atas Hamsin, S.Pi (Lurah Watonea), La Ode Muhajirin Sahida, S.Sos., dan Waode Rabiah, SH.

Lurah Watonea, Hamsin, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan partisipasi aktif warga yang telah melahirkan koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi bersama.

“Semoga koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan transparan,” ujar Hamsin dalam sambutannya.

Ketua terpilih Koperasi Kelurahan Merah Putih, Faisal, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan kesiapannya untuk bekerja secara total demi kemajuan masyarakat Watonea.

“Kami akan mengelola koperasi ini dengan maksimal. Ini bukan hanya organisasi, tapi harapan bersama untuk kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Dengan terbentuknya koperasi ini, masyarakat Watonea berharap dapat menciptakan ruang usaha baru yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi keluarga, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam pembangunan kelurahan.

---

## **CPK Bombana Juara Bupati Cup Basket Ball 100 Days Celebration**

**Bombana, sultranet.com** - Turnamen *Bupati Cup Basket Ball 100 Days Celebration* resmi ditutup dengan penuh semarak dan antusiasme. Penutupan

turnamen menjadi salah satu agenda kegiatan ekpos 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H. Burhanuddin dan Ahmad Yani. Acara ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan olahraga dan pembinaan generasi muda Bombana, bertempat di gedung SOR Bombana, Kamis (29/5/2025).

Club Basket Ball CPK Bombana berhasil keluar sebagai juara pertama pada kategori umum putra setelah tampil gemilang sepanjang turnamen. Posisi kedua diraih oleh tim Miracle dari Kota Bau-Bau, disusul Tim Bhayangkara di tempat ketiga. Sementara di kategori umum putri, RPM tampil sebagai juara pertama, diikuti Modal Nekat sebagai juara dua dan Kita-Kita Basket di posisi ketiga.

Ketua panitia turnamen, Sulfan Sultani Burhanuddin, menyampaikan rasa bangganya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, turnamen ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

“Tujuan kami sejak awal adalah membuka ruang bagi anak-anak muda agar bisa menunjukkan skill mereka di lapangan. Di turnamen ini, kita bisa lihat langsung hasil latihan mereka. Dari sini, kami berharap bisa menjaring bibit unggul yang siap dibawa ke Porprov tahun depan,” ujar Sulfan.



Foto bersama Tim CPK Bombana

Putera Bupati Bombana itu menjelaskan, kegiatan ini menjadi Bupati Cup pertama di bawah kepemimpinan H. Burhanuddin dan Ahmad Yani. Turnamen ini juga menjadi wajah baru bagi Perbasi Bombana dalam menyambut wacana Bombana sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026 mendatang.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa atlet-atlet Bombana punya potensi besar. Saat ini dan ke depan, mereka bisa mengharumkan nama daerah lewat prestasi olahraga. Kami juga siap menjadi tuan rumah Porprov yang terbuka, adil, dan siap menyambut semua atlet dari kabupaten dan kota se-Sultra,” jelasnya.

Sulfan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang, khususnya CPK Bombana yang berhasil membawa nama Bombana ke puncak juara. Ia berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh komunitas olahraga di Bombana untuk terus berlatih dan berkembang.

“Selamat untuk CPK Bombana. Ini bukti bahwa kita bisa bersaing di level Sultra.

Masyarakat Bombana harus percaya, Perbasi Bombana terus bergerak membawa nama daerah ini lebih tinggi lewat olahraga," tutup Sulfan.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Istri Wakil Bupati Bombana, Henny Setiawati Rachman, sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Bombana dan tamu undangan lainnya. (IS)

---

# Macron Kunjungi Candi Borobudur, Teken Kerja Sama Ekraf Indonesia-Prancis

**MAGELANG, sultranet.com** - Dalam kunjungan bersejarahnya ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendatangi Candi Borobudur, Kamis, 29 Mei 2025, usai menghadiri sejumlah agenda kenegaraan di Akademi Militer Magelang.

Kedatangan Macron disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang turut mendampingi selama kunjungan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

Presiden Macron tiba di kompleks Candi Borobudur sekitar pukul 14.00 WIB dan disambut dengan hangat oleh para pejabat Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Macron mengagumi kekayaan budaya dan warisan leluhur Indonesia yang tertuang dalam kemegahan Candi Borobudur.

Kunjungan ini juga menjadi simbol penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis, terutama di sektor ekonomi kreatif.

Presiden Prabowo menyebut bahwa dirinya merasa terhormat bisa mendampingi Presiden Macron mengunjungi salah satu situs warisan dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

“Saya percaya dan optimistis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku ekonomi kreatif, dan semua tokoh masyarakat dari kedua negara,” kata Presiden Prabowo.



Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai kehadiran Presiden Macron di Borobudur bukan hanya sebagai kunjungan wisata budaya, melainkan juga penghormatan terhadap kreativitas dan karya besar leluhur Indonesia.

“Kunjungan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap karya agung masa lampau bangsa kita. Borobudur bukan hanya monumen sejarah, tapi juga sumber inspirasi bagi para pelaku kreatif Indonesia untuk terus berkarya,” ujar Riefky.

Lebih lanjut, Riefky menegaskan bahwa kunjungan ini memperkuat komitmen Prancis untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam

pengembangan ekonomi kreatif.

Sehari sebelumnya, kedua negara telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama ekonomi kreatif di Istana Negara.

“Kemarin kami menandatangani MoU kerja sama antara Indonesia dan Prancis yang mencakup subsektor game, film, animasi, series, fesyen, desain, hingga kriya. Hari ini kami menerima Presiden Macron di Borobudur, setelah sebelumnya menerima Menteri Rasyida Dati di kantor kami. Ini adalah langkah awal kerja sama konkret, setara, dan saling menguntungkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan bilateral itu, kedua negara berkomitmen untuk memperkuat hubungan di sektor-sektor ekonomi kreatif, melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara pelaku industri dari kedua negara.

Sejumlah program aktivasi bersama akan dilakukan baik di Indonesia maupun di Prancis, sebagai wujud nyata dari MoU tersebut.

Kehadiran Presiden Macron juga mencerminkan ketertarikan Pemerintah Prancis terhadap potensi kekuatan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia.

Melalui kerja sama ini, diharapkan lahir lebih banyak peluang untuk promosi budaya dan industri kreatif Indonesia di kancah global.

Usai berkeliling dan menikmati keindahan Candi Borobudur, rombongan Presiden Macron bertolak menuju Bandara Yogyakarta Internasional Airport untuk melanjutkan lawatan kenegaraan ke negara berikutnya.

Kunjungan ke Borobudur ini menandai penutup agenda Macron selama di Jawa Tengah sebelum meninggalkan Indonesia.

---

## **Bupati H. Burhanuddin Dilantik**

# Pimpin Mabicab Pramuka Bombana

**Bombana, sultranet.com** - Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama jajarannya, resmi dilantik sebagai Ketua dan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2024-2029 oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Pelantikan yang digelar di Gedung Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (29/5/2025), juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Bombana, Edi, S.Ag., M.Si beserta pengurus, serta pengurus lembaga pemeriksa keuangan Kwarcab oleh Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.

Dalam amanatnya, Asrun Lio menegaskan pentingnya keberadaan Gerakan Pramuka dalam membangun karakter generasi muda serta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

“Gerakan Pramuka mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan hidup yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Kalau ingin mencari manusia yang bertanggung jawab, setia terhadap Pancasila, dan disiplin, maka carilah dari Pramuka,” tegas Asrun Lio.



Foto bersama usai Pelantikan

Ia juga menekankan bahwa Pramuka bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi bagian dari strategi nasional dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman disintegrasi bangsa.

Pemerintah Provinsi Sultra, lanjutnya, memberikan perhatian serius terhadap hal ini, bahkan telah mengalokasikan dana hibah yang jauh lebih besar pada tahun 2025 untuk pembinaan kepramukaan di seluruh daerah.

“Pemerintah Provinsi berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Gerakan Pramuka. Tahun 2025, kami sudah alokasikan dana hibah yang cukup besar, karena kami percaya salah satu jalur terbaik membina generasi bangsa adalah melalui Pramuka,” ujarnya.

Asrun juga mengungkapkan bahwa meskipun pelantikan ini sempat tertunda karena pelantikan kepala daerah secara nasional pada Februari lalu, ia bersyukur pelantikan di Bombana dapat terlaksana dengan baik dan menjadi yang pertama di Sulawesi Tenggara.

Selain penguatan karakter dan kepemimpinan, Gerakan Pramuka juga disebut aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, hingga pendidikan bencana dan kebangsaan.

Pramuka juga memiliki mekanisme pengawasan keuangan internal melalui lembaga pemeriksa keuangan sendiri, yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan.

“Pramuka adalah mitra potensial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pengurus yang baru saja dilantik untuk bekerja sungguh-sungguh dan menjadi pelita bagi generasi muda,” pungkas Asrun Lio.



Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin mengaku siap menjalankan amanah sebagai Ketua Mabicab dan mendukung penuh program-program kepramukaan di Bombana.

“Kami siap menjadi pembina dan mitra aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan kepramukaan di Bombana, demi membentuk generasi muda yang

berkarakter, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Ketua Kwardcab Bombana yang baru dilantik, Edi, S.Ag., M.Si., juga menyatakan kesiapannya memimpin gerakan Pramuka Bombana dengan semangat kolaborasi dan integritas.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Mabicab, Kwardcab, dan semua gugus depan demi keberhasilan program-program kepramukaan di daerah.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi penguatan gerakan Pramuka di Bombana dan Sulawesi Tenggara secara umum, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membina karakter bangsa melalui pendidikan nonformal yang terstruktur dan berkelanjutan.

---

## **Beri Program Asimilasi pada Warga Binaan, Lapas Raha Dorong Reintegrasi Sosial**

**Muna, sultranet.com** - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Raha kembali mengambil langkah penting dalam pembinaan warga binaan dengan memberikan program asimilasi kepada La Ode Gomberto, seorang narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan perilaku. Asimilasi ini mulai berlaku Rabu, 28 Mei 2025, dan menjadi bagian dari proses menuju reintegrasi sosial yang lebih humanis dan bertanggung jawab.

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Raha, Asril Yasin, mengatakan bahwa keputusan pemberian asimilasi kepada La Ode Gomberto tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui proses seleksi ketat yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasyarakatan daerah hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Asimilasi ini diawali dengan usulan dari lapas, lalu dikaji di tingkat provinsi,

kemudian disidangkan di tingkat pusat. Keputusan akhir berada di tangan Dirjen Pemasyarakatan,” ujar Asril saat dikonfirmasi di Raha.

La Ode Gomberto akan menjalani asimilasi di luar lapas selama sembilan jam kerja setiap harinya, dan kembali ke rumah tahanan pada sore hari. Perusahaan yang bersedia mempekerjakannya juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan program ini.

“Yang bersangkutan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama menjalani masa tahanan. Ia juga sudah mendapatkan dukungan dari perusahaan yang bersedia menerima dan membimbing selama masa asimilasi,” jelas Asril.

Menurutnya, setiap warga binaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan berupa remisi, asimilasi, maupun pembebasan bersyarat, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau curiga terhadap proses pemberian asimilasi ini, karena seluruh prosedur dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak ada istilah main mata. Semua keputusan diambil berdasarkan hasil sidang dan proses verifikasi ketat dari pusat. Kami hanya menjalankan tugas sebagai fasilitator pembinaan,” tegas Asril.

Asimilasi menjadi salah satu bentuk pembinaan yang mendorong narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat secara bertahap. Proses ini penting agar mereka mampu menyesuaikan diri, membangun kembali kepercayaan, serta menjadi bagian aktif dalam lingkungan sosialnya.

Asril berharap, langkah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi warga binaan lain untuk menunjukkan perubahan sikap positif selama masa pembinaan.

“Kami ingin tunjukkan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tempat menghukum, tapi juga ruang untuk memperbaiki diri. Jika mereka bersungguh-sungguh, maka hak mereka tetap kami fasilitasi,” pungkasnya.

Program asimilasi ini sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong sistem pemasyarakatan yang berbasis pada pendekatan keadilan restoratif, di mana pembinaan warga binaan difokuskan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pribadi, dan pemberdayaan pasca-hukuman.

---

# Program Satu Desa Satu Hafidz di Bombana Dimulai

**Bombana, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi memulai salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H. Burhanudin dan Ahmad Yani yaitu "Satu Desa Satu Hafidz" yaitu program yang bertujuan melahirkan satu penghafal Al-Quran setiap Desa. Tahap awal program ini, Pemkab bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Bombana.

Kerja sama yang dibangun ini merupakan upaya mewujudkan masyarakat Qurani dan membentuk generasi penghafal Al-Qur'an yang tersebar di seluruh desa di Bombana.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bombana dan Ponpes Ibnu Mas'ud digelar pada 26 Mei 2025, bertempat di Pendopo Rujab Bupati Bombana.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin menjelaskan Program ini ditargetkan melahirkan satu hafidz 30 juz di setiap desa dalam waktu tiga tahun kedepan.

Untuk tahap awal, pendataan dan survei telah dilakukan, dan pendaftaran calon tahfidz akan dibuka pada awal penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 ini.

Suami H. Fatmawati Kasim Marewa itu berharap program ini mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap pendidikan pesantren.

Ia menegaskan bahwa pondok pesantren modern perlu disiapkan di Bombana agar anak-anak tidak harus merantau ke luar daerah untuk menimba ilmu agama.

"Selama ini banyak santri dari Bombana yang mondok di Kendari atau luar daerah. Ke depan kita ingin menghadirkan pesantren berkualitas di daerah sendiri, dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung," tegas Burhanudin.

Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para penghafal

Al-Qur'an. Menurutnya, perhatian dari pemerintah dan masyarakat harus terus diberikan, tidak hanya saat proses belajar, tapi juga ketika para hafidz telah kembali ke desa masing-masing.

"Ketika anak-anak ini telah menyelesaikan hafalannya, jangan biarkan mereka kesulitan bahkan untuk makan. Ini tanggung jawab kita semua. Mereka adalah aset umat, pembawa cahaya Al-Qur'an untuk masyarakat," ungkap Burhanudin

Ia menegaskan komitmen Pemkab dalam memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda.

"Kami ingin menjadikan Bombana sebagai Kota Santri di Sultra. Hadirnya hafidz di setiap desa akan membawa pengaruh positif, menjadi panutan bagi masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai religius di tengah kehidupan sosial kita," ucap Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa peran pesantren tidak hanya mencetak hafidz, tetapi juga membentuk manusia yang cerdas secara spiritual, emosional, dan intelektual.

Bupati juga menegaskan pentingnya menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang berkualitas dan layak bagi generasi penerus.

"Zaman dulu orang tua memasukkan anak ke pesantren dengan niat untuk menguatkan mental, meski dalam keterbatasan. Tapi sekarang, kita harus menyiapkan yang terbaik. Gedung yang layak, fasilitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung agar pesantren bisa menjadi pilihan utama masyarakat," jelasnya.



Burhanuddin juga mengajak semua pihak, dari pemerintah desa hingga tokoh masyarakat, untuk ambil bagian dalam mendukung program ini, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

“Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kita semua. Mari ulurkan tangan, bantu mereka yang belajar agama. Ini bagian dari amal jariyah kita. Mereka adalah generasi penerus yang akan membimbing masyarakat dengan ilmu dan akhlak Qurani,” tuturnya.

Ia berharap agar langkah awal ini menjadi pintu gerbang lahirnya lebih banyak kerja sama serupa dengan pesantren-pesantren lainnya di Bombana.

“Ke depan, kita berharap tidak hanya satu, tapi banyak lembaga yang menjadi pusat penghafal Al-Qur’an di Bombana ini.” tandasnya.

Ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes Ibnu Mas’ud, Surahmat, S.Pd.I, menyampaikan rasa syukurnya atas sinergi antara lembaganya dan Pemkab Bombana. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama.

“Kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Ada banyak anak-anak kita di Bombana yang punya semangat belajar agama dan menghafal Al-Qur’an. Program ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir bersama kami, mendukung niat baik ini,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen dan perhatian Pemkab Bombana terhadap Pondok Pesantren dan mempercayakan salah satu program mulia ini.

“Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala niatan baik ini, agar terlaksana dengan baik,” tandasnya.

---

## **AMPI Sultra Dukung KTA Digital, Desak Percepatan SK Daerah**

**KENDARI, sultranet.com** - Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD I AMPI) Sulawesi Tenggara menyatakan komitmennya mendukung penuh digitalisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dicanangkan secara nasional oleh DPP AMPI. Program ini menargetkan satu juta anggota terdata secara digital se-Indonesia dan menjadi bagian dari transformasi organisasi kepemudaan di era modern.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris DPD I AMPI Sultra, Khalid Al Hadring Smith, saat ditemui usai rapat internal jelang pelaksanaan Musda DPD I Partai Golkar Sultra, di Kendari, Minggu, 25 Mei 2025.

“KTA digital ini adalah pintu masuk konsolidasi yang sesungguhnya. Bukan hanya soal kartu, ini soal identitas dan militansi kader,” ujar Ismith, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi KTA bukan sekadar inovasi teknis, melainkan strategi organisasi untuk membangun kekuatan pemuda yang solid, terorganisir, dan siap berkontribusi aktif dalam dinamika politik kebangsaan.

Program ini juga bersamaan dengan persiapan peluncuran **AMPI Media Center** pada 28 Mei 2025 mendatang. Media center tersebut diharapkan menjadi pusat

informasi, komunikasi, dan kolaborasi antar kader AMPI di seluruh Indonesia.

Meski begitu, Ismith mengingatkan bahwa digitalisasi tidak akan berarti tanpa konsolidasi organisasi secara menyeluruh, khususnya di tingkat daerah. Ia mendorong DPP AMPI agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi kepengurusan daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda).

“Sudah waktunya kita tinggalkan cara-cara lama yang lamban dan birokratis. Daerah yang sudah musda, harus segera disahkan SK-nya. Jangan sampai semangat kader di bawah justru padam karena pusat lamban bergerak,” katanya.

Dorongan percepatan SK ini menurutnya sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPP AMPI, Bahlil Lahadalia. Dalam forum Rakernas, Rapimnas, dan Halal Bi Halal DPP AMPI yang digelar 1 Mei 2025 lalu, Bahlil menekankan pentingnya konsolidasi organisasi hingga ke akar rumput.

“Kalau AMPI ingin menjadi kekuatan pemuda masa depan, jangan terjebak hanya di Pusat. Hidupkan AMPI di daerah, konsolidasikan dari bawah,” ucap Bahlil dalam pidatonya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, DPD I AMPI Sultra menyatakan kesiapannya untuk menjadi barisan terdepan dalam menyukseskan program konsolidasi nasional. Ismith menyebut pihaknya terus mendorong pembentukan dan pengaktifan kepengurusan AMPI di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

“Ini era baru. Kalau kita tidak siap berubah, kita akan ditinggalkan zaman. Digitalisasi KTA, percepatan SK, konsolidasi daerah—itu bukan slogan, itu kerja nyata,” tegasnya.

Ia menambahkan, AMPI Sultra tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam transformasi organisasi, melainkan menjadi pelaku aktif yang menggerakkan perubahan dari daerah. Ia pun berharap peluncuran media center nanti bukan hanya simbol, melainkan momentum kebangkitan organisasi pemuda berbasis data, digitalisasi, dan dedikasi.

Dengan langkah-langkah konkret ini, AMPI Sultra ingin menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah. Mereka ingin menjadi contoh bahwa organisasi kepemudaan bisa beradaptasi dengan zaman, tanpa kehilangan

semangat perjuangan dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.

---

# Dinas PUPR benahi Tata Ruang Kota Bombana

**Bombana, sultranet.com** - Komitmen mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana melalui Bidang Tata Ruang mulai melakukan pemasangan papan Informasi garis sempadan jalan dan larangan pembangunan di kawasan sempadan sungai. Jumat, 23 Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya awal pemerintah daerah dalam menata wajah kota agar lebih rapi, tertib, dan sesuai dengan peraturan tata ruang.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menindaklanjuti visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk menciptakan tata kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu prioritasnya adalah penataan ruang publik yang selama ini kerap luput dari perhatian,” ujar Sofian.

Sofian menambahkan bahwa papan informasi tersebut bukan semata simbol larangan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya menjaga ruang publik.

“Ini bagian dari proses penataan kota yang bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga perubahan perilaku dan kesadaran kolektif,” katanya.

Program ini, lanjutnya, akan terus diperluas ke titik-titik strategis lain di wilayah Bombana, sejalan dengan upaya menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih adaptif terhadap perkembangan daerah dan tantangan lingkungan.

Dinas PUPR juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya ini, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal agar penataan ruang dapat berjalan selaras dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.

“Kami berharap masyarakat mendukung langkah ini. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang taat aturan dan tidak mengorbankan ruang hidup bersama,” tegas Sofian.



Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid, ST, menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan memasang papan informasi larangan membangun di area sempadan sungai dan garis sempadan jalan yang telah ditetapkan.

“Papan informasi ini sebagai penanda batas yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pengembang. Ini penting demi menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi ruang kota,” jelas Rafid saat ditemui di lokasi pemasangan.

Salah satu titik yang menjadi prioritas adalah kawasan sempadan sungai di RTH 2 Rumbia, Gerbang Lameroro dan sempadan jalan di samping Alfamidi, yang selama ini dinilai rawan terjadi pelanggaran tata ruang.

Menurut Rafid, kawasan sempadan sungai harus tetap terbuka sebagai ruang hijau publik sekaligus sebagai area resapan air yang vital dalam menghadapi

potensi banjir.

“Jika dibiarkan dibangun tanpa pengawasan, dampaknya bukan hanya soal estetika kota, tapi juga bencana ekologis,” tandasnya

Pemasangan papan informasi ini menjadi langkah awal yang konkret dari pemerintahan Burhanuddin-Ahmad Yani dalam membangun Bombana yang lebih tertata, humanis, dan berkelanjutan sejak hari pertama mereka menjabat.

tata ruang kota, program 100 hari kerja, PUPR Bombana, larangan bangun di sempadan sungai.

---

# Jembatan Langkowala Segera Dikerjakan, LKPD: Buah Perjuangan Panjang dari Rakyat untuk Rakyat

**Bombana, sultranet.com** - Perjuangan panjang masyarakat, aktivis, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam mendorong penggantian Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.306.445.009 dari APBN 2025 untuk pembangunan ulang jembatan penghubung vital tersebut. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mekongga Mina Mandiri dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender.

Proyek penggantian Jembatan Langkowala merupakan respons atas aspirasi masyarakat Bombana yang disuarakan secara konsisten oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra sejak 9 Agustus 2024 hingga 14 Januari 2025. Aksi mereka tidak hanya berlangsung di Bombana, tetapi juga merambah hingga ke pusat pemerintahan di Kota Kendari.

“Ini bukan kemenangan LKPD semata, ini adalah kemenangan rakyat Bombana. Kami hanya wadah yang mempertemukan suara-suara kecil menjadi gema yang besar,” ujar Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham. Kamis (8/5/2025)

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil gotong royong dari berbagai elemen masyarakat yang bergerak dengan satu tujuan: memperjuangkan hak dasar atas infrastruktur yang layak.

“Kami bergerak bukan karena benci, tetapi karena cinta pada daerah ini. Setiap langkah kami adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyebut peran penting jajaran BPJN Wilayah I Sultra, DPRD Provinsi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Bombana yang saat itu diwakili oleh Sekda almarhum Man Arfa.

Sosok almarhum Man Arfa dikenang sebagai birokrat yang setia pada rakyat. Ia bahkan turut turun ke jalan bersama massa aksi LKPD di bawah terik matahari.

“Semoga menjadi amal jariyah bagi almarhum. Beliau adalah birokrat tulus yang tidak banyak bicara, tapi bergerak nyata,” ujar Arham mengenang.

Kepala Dinas PU Bombana, Sofian Baco, dan Inspektur Inspektorat, Ridwan, juga disebut sebagai pihak yang setia mendampingi aksi masyarakat. Di belakang layar, ada tokoh-tokoh sederhana yang memilih untuk tidak tampil ke depan namun bekerja senyap memperkuat jaringan advokasi.

Menurut Arham terdapat dua figur penting yang turut mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat adalah Arfa (Bang Rambo) dan Ketua DPD Golkar Bombana, Heryanto. Keduanya bahkan melakukan audiensi langsung dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk meyakinkan mendesaknya pergantian jembatan Langkowala.

“Jembatan Langkowala ini adalah urat nadi penghubung utama menuju dan keluar dari Wonua Bombana melalui jalur Konsel. Ketika rusak, bukan hanya kendaraan yang terganggu, tapi roda ekonomi masyarakat juga tersendat,” tegas Arham.

Para jurnalis lokal yang konsisten mengangkat isu ini juga mendapat apresiasi dari LKPD. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari mata rantai perubahan.

Kapolres Bombana dan jajaran serta Satpol PP Kabupaten Bombana pun mendapat ucapan terima kasih atas peran mereka yang menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif selama berlangsungnya aksi.

Muh. Arham menutup pernyataannya dengan refleksi perjuangan yang penuh makna. “Jembatan ini adalah simbol. Di atasnya nanti bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga harapan dan masa depan rakyat Bombana. Perjuangan belum selesai, tapi ini adalah tonggak penting yang harus kita rayakan dengan terus menjaga semangat kolektif,” tandasnya.

Kepala Satuan Kerja BPJN Wilayah I Sultra, Marlin Ramli, bersama PPK 1.4 Langkowala, Sandi Prima Yudha, turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong segera dilakukan pekerjaan di jembatan tersebut.

“Terima kasih atas kerja keras dan ketulusan semua pihak yang mengawal isu ini hingga terealisasi dalam bentuk proyek nyata,” kata Marlin saat menerima audiensi LKPD Sultra.

Gerakan ini bukan hanya mencatatkan hasil berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan kesadaran bersama tentang pentingnya hak rakyat atas infrastruktur yang layak dan pemerintahan yang responsif.